



**RENCANA KERJA
TAHUN 2020**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN PACITAN**

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

INSPEKTORAT

Jln. Ahmad Yani 65A Kode Pos 63512

Telp. (0357) 884879 email : inspektorat@pacitankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

INSPEKTORAT

JL. A. Yani Nomor. 65 A Pacitan, Kode Pos 63512
Telp. (0357) 881164 Fax. 884879, e-mail : inspektorat@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN NOMOR : 188/ 13 /408.48/2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020

INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan perlu menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA


Penetapan ini sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Tanggal : 18 Juli 2019


INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN
INSPEKTORAT
I. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks
Pembina Utama Muda
NIP. 1962106 199003 2 005

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Pacitan
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Pacitan
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pacitan tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Pacitan untuk tahun 2020, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugasnya dibidang pembinaan dan pengawasan untuk tahun 2020.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang konstruktif dari semua pihak.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini dapat bermanfaat.

Pacitan, 18 Juli 2019


Ir. LANNARIA HUTAGALUNG, M.Aks
Pembina Utama Muda
NIP. 19620106 199003 2 005

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.	LATAR BELAKANG	1
2.	LANDASAN HUKUM	2
3.	MAKSUD DAN TUJUAN	3
4.	SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU	10
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra Inpektorat.....	10
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	23
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat.....	40
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	53
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	53
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat	53
3.3	Program dan Kegiatan	54
BAB IV	RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020	61
BAB V	PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 21 ayat (3) disampaikan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut SKPD wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD tahun 2020. Sedangkan RKPD tahun 2020 dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, diawali dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Inspektorat merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pacitan sebagaimana Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan.

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Pacitan sebagai perangkat daerah, menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang disusun dengan

tahapan dan tatacara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pacitan tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan di daerah.

2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025;
- k. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020 dimaksudkan untuk referensi dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur

penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Kabupaten Pacitan selama tahun 2020.
3. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020, dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pacitan tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah propinsi yang dilaksanakan di daerah.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang regulasi yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu atau tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2019 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2018 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM dan/atau IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi dan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian atas program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dalam kelompok masyarakat yang terkait langsung dalam pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang hasil penelaahan kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan:
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b) Pencapaian SDGs,
 - c) Pengentasan kemiskinan,
 - d) Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - f) Pengembangan daerah terisolir,
 - g) dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan,
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu),
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bagian ini dijelaskan rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021, yang memuat urusan / bidang Pemerintahan Daerah dan program / kegiatan, indikator

kinerja program / kegiatan, rencana tahun 2020 (lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana / pagu indikatif, sumber dana), catatan penting dan prakiraan maju rencana tahun 2021 (target capaian kinerja, kebutuhan dana / pagu indikatif).

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, serta beberapa penjelasan yang memuat:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah, nama Perangkat Daerah dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra Inspektorat

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Inspektorat Kabupaten Pacitan memuat kajian (*reviu*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Pacitan tahun lalu. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2018 dan capaian Renstra megacu pada hasil laporan capaian kinerja dan laporan realisasi keuangan belanja APBD Inspektorat Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yang yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan Belanja APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 6.111.268.504,40 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.646.587.585,40 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.464.680.919,00 dari total anggaran tersebut, yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 5.769.974.853,00 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,41 %.

Pada umumnya program/kegiatan telah memenuhi target kinerja yang telah direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

- 1) Jumlah Anggaran: Rp. 937.544.350,00
- 2) Realisasi:Rp. 900.312.903,00
- 3) Kinerja Anggaran:96,03 %
- 4) Rencana Output:Terselenggaranya pelayanan administrasi 1 tahun anggaran
- 5) Realisasi Output:Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun anggaran.
- 6) Capaian Kinerja:100 %

7) Outcomes:Terwujudnya kebutuhan dasar operasional

Perangkat daerah

2. Program:Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan:Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

1) Jumlah Anggaran:Rp. 22.850.000,00

2) Realisasi:Rp. 20.070.550,00

3) Kinerja Anggaran:87,84%

4) Rencana Output:Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja perangkat daerah sebanyak 6 dokumen

5) Realisasi Output:Dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan capaian kinerja perangkat daerah sebanyak 6 dokumen.

6) Capaian Kinerja:100%

7) Outcomes:Sebagai acuan untuk perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.

3. Program:Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

a. Kegiatan :Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

1) Jumlah Anggaran :Rp. 490.085.000,00

2) Realisasi:Rp. 418.344.234,00

3) Kinerja Anggaran:85,36 %

4) Rencana Output:Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler sebanyak 46 LHP

5) Realisasi Output:Laporan hasil pemeriksaan reguler sebanyak 46 LHP.

6) Capaian Kinerja:100 %

7) Outcomes:Bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

b. Kegiatan :Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

- 1) Jumlah Anggaran :Rp. 177.620.000,00
- 2) Realisasi:Rp. 172.498.064,00
- 3) Kinerja Anggaran:97,12 %
- 4) Rencana Output:Jumlah laporan TLHP dan rakorwas dengan target 4 dokumen.
- 5) Realisasi Output:Laporan TLHP dan rakorwas sebanyak 4 dokumen.
- 6) Capaian Kinerja:100%
- 7) Outcomes:Bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

c. Kegiatan: Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

- 1) Jumlah Anggaran:Rp. 57.511.569,00
- 2) Realisasi:Rp. 33.516.569,00
- 3) Kinerja Anggaran:58,28 %
- 4) Rencana Output:Jumlah dokumen Ikhtisar hasil pengawasan sebanyak 2 dokumen.
- 5) Realisasi Output:Dokumen ikhtisar hasil pengawasan sebanyak 2 dokumen.
- 6) Capaian Kinerja:100%
- 7) Outcomes:Sebagai referensi untuk bahan perbaikan/evaluasi ataupun perencanaan untuk tahun berikutnya.

d. Kegiatan :Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Jumlah Anggaran:Rp. 46.350.000,00
- 2) Realisasi:Rp. 44.745.500,00
- 3) Kinerja Anggaran : 96,54 %
- 4) Rencana Output : Jumlah laporan hasil reviu atas LKPD sebanyak 1 dokumen
- 5) Realisasi Output:Laporan hasil reviu atas LKPD sebanyak 1 dokumen.
- 6) Capaian Kinerja: 100%
- 7) Outcomes:Membantu terlaksananya penyelenggaraan

akuntansi dan penyajian LKPD serta memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAPD dan LKPD telah disajikan sesuai dengan SAP.

e. Kegiatan :Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah

- 1) Jumlah Anggaran :Rp. 85.540.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 83.345.085,00
- 3) Kinerja Anggaran :97,43%
- 4) Rencana Output :Jumlah laporan hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran sebanyak 9 dokumen
- 5) Realisasi Output :Laporan hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran sebanyak 9 dokumen.
- 6) Capaian Kinerja :100 %
- 7) Outcomes :Rekomendasi perbaikan / evaluasi ataupun perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

f. Kegiatan: Pengawasan Pemerintahan Desa dan Tujuan Tertentu

- 1) Jumlah Anggaran :Rp. 500.000.000,00
- 2) Realisasi:Rp. 499.611.656,00
- 3) Kinerja Anggaran:99,92 %
- 4) Rencana Output:Jumlah laporan hasil pemeriksaan sebanyak 84 LHP
- 5) Realisasi Output:Laporan hasil pemeriksaan sebanyak 84 LHP
- 6) Capaian Kinerja:100%
- 7) Outcomes:Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Kegiatan:Reviu LKj.IP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP

Perangkat Daerah

- 1) Jumlah Anggaran:Rp. 116.450.000,00
- 2) Realisasi:Rp. 103.131.991,00
- 3) Kinerja Anggaran:88,56 %
- 4) Rencana Output:Jumlah Laporan Hasil Reviu LKj.IP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP perangkat daerah sebanyak 1 LHR dan 43 LHE.
- 5) Realisasi Output:Laporan Hasil Reviu LKj.IP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP perangkat daerah sebanyak 1 LHR dan 43LHE
- 6) Capaian Kinerja:100 %
- 7) Outcomes:Rekomendasi bahan penyusunan LKj.IP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP perangkat daerah.

h. Kegiatan: Pengawasan Reformasi Birokrasi

- 1) Jumlah Anggaran:Rp. 232.851.000,00
- 2) Realisasi:Rp. 192.885.476,00
- 3) Kinerja Anggaran:82,84 %
- 4) Rencana Output:Jumlah laporan hasil pengawasan reformasi birokrasi sebanyak 4 dokumen
- 5) Realisasi Output:Laporan hasil pengawasan reformasi birokrasi sebanyak 4 dokumen.
- 6) Capaian Kinerja:100 %
- 7) Outcomes:Sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.

i. Kegiatan: Penanganan izin perceraian bagi PNS

- 1) Jumlah Anggaran:Rp. 27.535.000,00
- 2) Realisasi:Rp. 22.902.550,00
- 3) Kinerja Anggaran:83,18 %
- 4) Rencana Output:Jumlah laporan penanganan izin perceraian PNS sebanyak 20 dokumen.
- 5) Realisasi Output:Laporan penanganan izin perceraian PNS

sebanyak 17 dokumen.

6) Capaian Kinerja:85 %

7) Outcomes:Sebagai bahan evaluasi terhadap kedisiplinan PNS.

j. Kegiatan:Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

1) Jumlah Anggaran:Rp. 34.000.000,00

2) Realisasi:Rp. 27.243.000,00

3) Kinerja Anggaran:80,13 %

4) Rencana Output:Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebanyak 8 perangkat daerah.

5) Realisasi Output:Perangkat daerah yang sudah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebanyak 8 perangkat daerah.

6) Capaian Kinerja:100%

7) Outcomes:Sebagai bahan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah dilingkup pemerintah Kabupaten Pacitan.

4. Program:Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

a. Kegiatan:Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

1) Jumlah Anggaran:Rp. 137.000.000,00

2) Realisasi:Rp. 131.189.600,00

3) Kinerja Anggaran:95,76 %

4) Rencana Output:Jumlah pelatihan internal yang dilaksanakan sebanyak 2 PKS, 3 Workshop.

5) Realisasi Output:Terlaksananya pelatihan internal yang dilaksanakan sebanyak 2 PKS, 3 Workshop.

6) Capaian Kinerja:100 %

7) Outcomes:Meningkatnya kompetensi, pengetahuan, keahlian APIP.

b. Kegiatan:Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Bidang Pengawasan

- 1) Jumlah Anggaran:Rp. 300.000.000,00
- 2) Realisasi:Rp. 285.782.475,00
- 3) Kinerja Anggaran:95,26 %
- 4) Rencana Output:Jumlah pengembangan wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur bidang pengawasan sebanyak 3 kali.
- 5) Realisasi Output:Terlaksananya pengembangan wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur bidang pengawasan sebanyak 3 kali.
- 6) Capaian Kinerja:100%
- 7) Outcomes:Memperoleh gambaran mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi *best practice* untuk meraih sasaran yang diinginkan.

c. Kegiatan:Peningkatan Kualitas Pengawas

- 1) Jumlah Anggaran :Rp. 65.695.000,00
- 2) Realisasi :Rp. 54.535.122,00
- 3) Kinerja Anggaran :83,01 %
- 4) Rencana Output :Jumlah APIP yang mengikuti diklat/bimtek sebanyak 18 orang.
- 5) Realisasi Output :APIP yang sudah mengikuti diklat/bimtek sebanyak 18 orang.
- 6) Capaian Kinerja :100 %
- 7) Outcomes : Meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keahlian APIP

5. Program:Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan**Kegiatan :Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan**

- 1) Jumlah Anggaran:Rp. 75.750.000,00
- 2) Realisasi:Rp. 65.015.825,00
- 3) Kinerja Anggaran:85,83 %
- 4) Rencana Output:Jumlah dokumen sistem dan prosedur pengawasan sebanyak 3 dokumen.

- 5) Realisasi Output: Tersusunnya dokumen sistem dan prosedur pengawasan sebanyak 3 dokumen.
- 6) Capaian Kinerja: 100%
- 7) Outcomes: Sebagai panduan pelaksanaan pengawasan bagi APIP

6. Program: Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

a. Kegiatan: Unit Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Kasus

Pengaduan

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 68.225.000,00
- 2) Realisasi : Rp. 16.226.900,00
- 3) Kinerja Anggaran : 23,78%
- 4) Rencana Output : Jumlah penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 7 laporan.
- 5) Realisasi Output : Terlaksananya penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 4 laporan.
- 6) Capaian Kinerja : 57,14 %
- 7) Outcomes : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

b. Kegiatan: Operasionalisasi Saber Pungli

- 1) Jumlah Anggaran : Rp. 89.674.000,00
- 2) Realisasi: Rp. 81.780.850,00
- 3) Kinerja Anggaran: 91,20%
- 4) Rencana Output: Jumlah sosialisasi saber pungli sebanyak 2 kali.
- 5) Realisasi Output: Terlaksananya sosialisasi saber pungli sebanyak 7 kali.
- 6) Capaian Kinerja: 350 %
- 7) Outcomes: Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai saber pungli.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
DAN PENCAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT s/d TAHUN 2018
KABUPATEN PACITAN

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 atau (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 atau (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2019	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
1										
1										
1	01									
1	01	01								
1	01	01	19							
1	01	06								
1	01	06	01							
1	01	06	14							

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 atau (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 atau (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2019				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
5	01	20											
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan: - Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT - Penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan									
5	01	02	12	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) (2017 – 2018)	5 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	60%
5	01	20	12		Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD (2019)			1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	40%
5	01	20	13	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	Jumlah laporan hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran (2017 – 2019)	39 Laporan	16 laporan	9 laporan	0	0	9 laporan	25 laporan	64,10%
5	01	20	15	Reviu LKj.IP Pemda dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Reviu LKj.IP Pemda dan evaluasi SAKIP perangkat daerah (2017 – 2019)	205 Laporan	73 laporan	44 laporan	44 laporan	100%	44 laporan	161 laporan	78,53%
5	01	20	17	Penanganan izin perceraian bagi PNS	Jumlah laporan izin perceraian bagi PNS (2017 – 2019)	60 Laporan	26 laporan	12 laporan	7 laporan	58,33%	12 laporan	45 laporan	75%
5	01	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan PKPT/ Reguler (2017)	202	30 laporan	0	0	0%	0	30 laporan	14,85%
					Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler dan khusus (2018)		46 laporan	46 laporan	46 Laporan	100%	46 laporan	138 laporan	68,32%
5	01	20	01	Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan reguler		0	47 laporan	1	2,12 %	47 laporan	48 laporan	23,76%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 atau (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 atau (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2019				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
		(2019)											
5	01	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan TLHP dan rakorwas (2017 – 2018)	20	10 laporan	0	0	0%	0	10 laporan	50%
5	01	20	20	Permutakhiran TLHP	Jumlah laporan TLHP/ Rakorwas (2019)		0	4 laporan	3 laporan	75%	0	3 laporan	15%
5	01	20	08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah dokumen Ikhtisar hasil pengawasan (2017 – 2018)	10 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	0	0,00%	2 dokumen	5 dokumen	50,00%
5	01	20	21	Monitoring dan Evaluasi TLHP	Jumlah dokumen ikhtisar hasil pengawasan evaluasi TLHP (2019)		0	2 dokumen	0	0	0	0	0
5	01	20	15	Pengawasan Pemerintahan Desa dan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (2017 -2018)	396 dokumen	144 laporan	96 laporan	96 laporan	100%	96 laporan	336 laporan	84,84%
5	01	20	22	Pemeriksaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (2019)		0	96 laporan	0	0	0	0	0
5	01	20	18	Pengawasan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang telah mengikuti asistensi pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi (2017)	28	28	0	0	0	0	28	100%
					Jumlah laporan hasil pengawasan reformasi birokrasi (2018)	4 Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 laporan	3%
5	01	20	24	Pengawasan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas (2019)	9 Laporan	0	3 laporan	3 laporan	100%	0	3 laporan	33,33%

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 atau (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 atau (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2019				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
5	01	20	18	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan baik (2017 – 2018)	16	16	8	8	100%	8	32	200%
5	01	20	25	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Terlaksananya asistensi pendampingan SPIP ke perangkat daerah (2019)	3	0	1	0	0	1	1	33,33%
5	01	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawas								
5	01	21	04	Peningkatan SDM aparatur bidang pengawasan	Jumlah benchmarking yang dilaksanakan (2017 – 2021)	15 Kali	3 kali	3 kali	3 Kali	100%	3 kali	9 kali	60%
5	01	21	01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pelatihan internal yang dilaksanakan (2017 – 2018)	14 Kali	11 kali	5 kali	5 Kali	100%	5 kali	21 kali	150%
5	01	21	04	Peningkatan kualitas pengawas	Jumlah pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan / bimtek pengawasan (2017 – 2018)	37 Orang	18 orang	18 orang	18 orang	100%	18 orang	54 orang	145%
5	01	21	05	Pelatihan pengembangan APIP	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan workshop yang dilaksanakan (2019)	18 Kali	0	6 kali	2 Kali	33,33%	6 kali	8 kali	44,44%
					Jumlah APIP yang mendapatkan Bimbingan Teknis (2019)	63 Orang	0	10 orang	4 Orang	40%	10 orang	14 orang	22,22%
5	01	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pedoman sistem dan prosedur pengawasan yang disusun								

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 atau (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 atau (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2019				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)			
5	01	22	02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen sistem dan prosedur pengawasan (2017 – 2018)	5 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	0	0,00%	5 dokumen	10 dokumen	2%
					Jumlah dokumen sistem dan prosedur pengawasan yang disusun (2019)	2 Dokumen	0	2 dokumen	0	0%	2 dokumen	2 dokumen	100%1
5	01	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat								
5	01	24	03	Pembentukan unit khusus penanganan saber pungli	Sosialisasi pembentukan unit khusus penanganan saber pungli (2017)	2 sosialisasi	2 sosialisasi	0	0	0%	0	0	0%
5	01	24	04	Operasionalisasi saber pungli	Jumlah sosialisasi saber pungli (2018 – 2019)	9 sosialisasi	7 sosialisasi	4 sosialisasi	0	0%	4 sosialisasi	11 sosialisasi	122%
5	01	24	03	Unit pengaduan masyarakat dan penanganan kasus pengaduan	Jumlah laporan penyelesaian pengaduan (2017 – 2018)	24 Laporan	0	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	8 laporan	33,33%
5	01	24	05	Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat (2019)	7 Laporan	18 laporan	7 laporan	4 laporan	57,14 %	7 laporan	29 laporan	414,28%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada bagian ke 6 pasal 28 yaitu mengatur tentang Pengukuran Kinerja yang mencakup diantaranya adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci terbagi menjadi 2 aspek yaitu untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan aspek tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan.

Berdasarkan hal diatas Inspektorat Kabupaten Pacitan menentukan Indikator Kinerja Kunci untuk aspek tataran pengambilan kebijakan daerah yaitu : Rasio Temuan BPK RI yang ditindak lanjuti, dengan rumus/perhitungan : Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI.

Hasil evaluasi pada tahun 2016 temuan BPK RI sejumlah 9 elemen data dan ditindaklanjuti sejumlah 9 elemen data, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Untuk tahun 2017 temuan BPK RI sejumlah 15 elemen data dan ditindaklanjuti sejumlah 15 elemen data, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Sebagaimana pada tampilan tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) MEMUAT CAPAIAN KINERJA PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA	SATUAN ELEMEN DATA	HASIL EVALUASI 2016		HASIL EVALUASI 2017		HASIL EVALUASI 2018	
				ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI	Temuan BPK RI	%	9	100%	15	100%	15	100%
		Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti		9		15		15	

Sedangkan untuk aspek tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Pacitan menentukan 8 aspek kebijakan, sebagai berikut :

1. Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Indikator Kinerja Kunci : Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
- Rumusan perhitungan : Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jenis data : Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Capaian kinerja : $1/3 \times 100\% = 33\%$
- Indikator Kinerja Kunci : Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
- Rumusan perhitungan : Ada atau tidak ada
- Jenis data : Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Capaian kinerja : $1/3 \times 100\% = 33\%$

2. Aspek Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan

- Indikator Kinerja Kunci : Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM
- Rumusan perhitungan : Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM x 100%
- Jenis data :
 - a. Peraturan Daerah Kab. Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab. Pacitan
 - b. Peraturan Daerah Kab. Pacitan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pacitan Tahun anggaran 2018

- c. Peraturan Daerah Kab. Pacitan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pacitan Th. 2019
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 - 2021

Capaian kinerja : $1/4 * 100\% = 25\%$

3. Aspek Penataan Kelembagaan Daerah

- Indikator Kinerja Kunci : Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Rumusan perhitungan : Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

Jenis data : Jabatan yang ada

Capaian kinerja : $9/9 * 100\% = 100\%$

- Indikator Kinerja Kunci : Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Rumusan perhitungan : Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Jenis data : Jabatan Fungsional

Capaian kinerja : $8/8 * 100\% = 100\%$

4. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah

- Indikator Kinerja Kunci : Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Rumusan perhitungan : Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Jenis data : Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim (orang)
- Capaian kinerja : $9/9 \times 100\% = 100\%$
- Indikator Kinerja Kunci : Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
- Rumusan perhitungan : Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Jenis data : Pejabat yang memenuhi kepangkatan (orang)
- Capaian kinerja : $9/9 \times 100\% = 100\%$
5. Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah
- Indikator Kinerja Kunci : Keberadaan dokumen perencanaan pemb. di SKPD (RENSTRA, RENJA, RKA)
- Rumusan perhitungan : Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
- Jenis data : Dokumen perencanaan yang ada
- Capaian kinerja : 5
- Indikator Kinerja Kunci : Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
- Rumusan perhitungan : Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Jenis data : Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD (program)
Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak (program)
- Capaian kinerja : $6/6 \times 100\%$
- Indikator Kinerja Kunci : Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Rumusan perhitungan	: Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
Jenis data	: Program Renja RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD (program) Program dalam DPA SKPD (program)
Capaian kinerja	: $6/6 * 100\%$
- Indikator Kinerja Kunci	: Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Rumusan perhitungan	: Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%
Jenis data	: Program Renja RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD (program) Program dalam DPA SKPD (program)
Capaian kinerja	: $6/6 * 100\%$

6. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Indikator Kinerja Kunci	: Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD
Rumusan perhitungan	: Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%
Jenis data	: Total alokasi belanja SKPD Total belanja APBD
Capaian kinerja	: $61.112.685.04 / 1.665.549.144.495,82 * 100\%$ $=0,00367$
- Indikator Kinerja Kunci	: Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)
Rumusan perhitungan	: Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
Jenis data	: Belanja modal SKPD Total belanja SKPD

- Capaian kinerja : $126.500.000 / 6.111.268.504 * 100\%$
=0,02070
- Indikator Kinerja Kunci : Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)
- Rumusan perhitungan : Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Jenis data : Total belanja pemeliharaan SKPD
Total belanja barang dan jasa SKPD
- Capaian kinerja : $23.000.000 / 2.201.920.919 * 100\%$
=0,01045
- Indikator Kinerja Kunci : Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi)
- Rumusan perhitungan : Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Jenis data : Total belanja pemeliharaan SKPD
Total belanja SKPD
- Capaian kinerja : $23.000.000 / 6.111.268.504 * 100\%$
=0,00376
- Indikator Kinerja Kunci : Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)
- Rumusan perhitungan : Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)
- Jenis data : Neraca
LRA
CALK
- Capaian kinerja : 3

7. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Indikator Kinerja Kunci : Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
- Rumusan perhitungan : Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD

- Jenis data : Buku Inventaris
- Capaian kinerja : 1
- Indikator Kinerja Kunci : Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
- Rumusan perhitungan : $\text{Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD} / \text{Jumlah total asset yang dikuasai SKPD} \times 100 \%$
- Jenis data : Aset yang tidak digunakan
Aset yang dikuasai SKPD
- Capaian kinerja : $0 / 2.357.532.417 * 100\%$
 $= 0$
8. Aspek Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat
- Indikator Kinerja Kunci : Jumlah fasilitas / prasarana informasi (Papan Pengumuman, Pos Pengaduan, Leaflet, Mobil keliling, Pengumuman di Mass Media)
- Rumusan perhitungan : Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
- Jenis data : Papan Pengumuman, Pos Pengaduan, Leaflet, Mobil keliling, Pengumuman di Mass Media
- Capaian kinerja : 4
- Indikator Kinerja Kunci : Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
- Rumusan perhitungan : Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
- Jenis data : Survey IKM
- Capaian kinerja : 1

Aspek tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan tersebut diatas kami tuangkan pada tabel dibawah ini :

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD 2018**

KABUPATEN : PACITAN
NAMA SKPD : INSPEKTORAT
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : URUSAN INSPEKTORAT DAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%		Jumlah program Nasional (RKP (program))	=	
						1	=	
						2	=	
							Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD (program)	=	1	
						1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	=	1	
							<u>Perhitungan :</u>			
						1			X 100%	33%
		3								
			Jenis SOP yang ditetapkan:	=	11	Ada				
		1	Agenda Surat Masuk	=	1					
		2	Agenda Surat Keluar	=	1					
		3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	=	1					
		4	Penetapan Angka Kredit JFA	=	1					
		5	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	=	1					
6	Pemeriksaan Reguler	=	1							
7	Pemeriksaan Aduan Masyarakat	=	1							
8	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	=	1							
9	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	=	1							
10	Monitoring Evaluasi	=	1							
11	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil	=	1							

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA	
							Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat			
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	1	Peraturan Daerah Kab. Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab. Pacitan	=		
						2	Peraturan Daerah Kab. Pacitan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pacitan Tahun anggaran 2018	=	1	
						3	Peraturan Daerah Kab. Pacitan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pacitan Th. 2019	=	1	
						4	Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021	=	1	
							PERDA pelaksanaan PERMEN ttg SPM, sebanyak	=	1	
							PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM, sebanyak	=	4	
							<u>Perhitungan :</u>			
							1			
	4		X 100%	25%						
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%		Jabatan yang terisi sebanyak (jabatan)	=	9	
							Jabatan yang ada sebanyak (jabatan)	=	9	
							<u>Perhitungan :</u>			
							9		X 100%	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD		Jabatan Fungsional :	=	16
						1	Auditor	=	8	
	2	P2UPD	=	8						
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS SKPD yang menangani Urusan terhadap Total PNS Kabupaten		PNS yang menangani Urusan Pendidikan (orang)	=	
							Total PNS Kabupaten sebanyak (orang)	=	
							<u>Perhitungan :</u>			
								X 100%%
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan		Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim (orang)	=	9	
							Pejabat yang ada sebanyak (orang)	=	9	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA
				pendidikan pelatihan kepemimpinan	kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%		<u>Perhitungan :</u>		
						9			
						9		X 100%	100%
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%		Pejabat yang memenuhi kepangkatan (orang)	=	9
							Pejabat yang ada (orang)	=	9
							<u>Perhitungan :</u>		
						9			
						9		X 100%	100%
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pemb. di SKPD (RENSTRA, RENJA, RKA)	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya		Dokumen perencanaan yang ada, sebanyak		5
							terdiri atas :		Dokumen
							- RENSTRA SKPD	=	1
							- RENJA SKPD	=	1
							- RKT	=	1
							- RKA-SKPD	=	1
							- DPA-SKPD	=	1
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%		Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD (program)	=	6
							Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak (program)	=	6
							<u>Perhitungan :</u>		
						6			
						6		X 100%	100%
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%		Program Renja RKPd yang diakomodir dalam DPA SKPD (program)	=	6
							Program dalam DPA SKPD (program)	=	6
							<u>Perhitungan :</u>		
						6			
						6		X 100%	100%
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%		Program Renja SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD (program)	=	6
							Program dalam DPA SKPD (program)	=	6
							<u>Perhitungan :</u>		
						6			
						6		X 100%	100%

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Alokasi anggaran belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	Total alokasi belanja SKPD (Rp)	=	Rp 6.111.268.504,00	
						Total belanja APBD (Rp.)	=	Rp 1.665.549.144.495,82	
						<u>Perhitungan :</u>			
						Rp.			
						Rp.		X 100%	0,00367
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (Realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja modal SKPD (Rp)	=	Rp 126.500.000,00	
						Total belanja SKPD (Rp)	=	Rp 6.111.268.504,00	
						<u>Perhitungan :</u>			
						Rp.			
						Rp.		X 100%	0,02070
Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	Total belanja pemeliharaan SKPD (Rp.)	=	Rp 23.000.000,00			
				Total belanja barang dan jasa SKPD (Rp.)	=	Rp 2.201.920.919,00			
				<u>Perhitungan :</u>					
	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Total belanja pemeliharaan SKPD (Rp.)	=	Rp 23.000.000,00			
				Total belanja SKPD (Rp)	=	Rp 6.111.268.504,00			
				<u>Perhitungan :</u>					
				Rp.		X 100%	0,00376		
Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	1 Neraca	=	1	Ada		
				2 LRA	=	1	Ada		
				3 CALK	=	1	Ada		
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada, jenis dokumennya terdiri dari :			
						1 Buku Inventaris	=	1	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	Aset yang tidak digunakan (Rp.)	=	0	
						Aset yang dikuasai SKPD (Rp.)	=	Rp 2.357.532.417	
						<u>Perhitungan :</u>			
				0					
				Rp 2.357.532.417		X 100%	0%		
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi (Papan Pengumuman,	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas / prasarana partisipasi :	=
						1 Papan Pengumuman	=	1	
						2 Mobil Keliling	=	-	
						3 Leaflet	=	1	
						4 Pos Pengaduan	=	1	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS / PERHITUNGAN	JENIS DATA			CAPAIAN KINERJA	
	PARTISIPASI MASYARAKAT	partisipasi masyarakat		Pos Pengaduan, Leaflet, Mobil keliling, Pengumuman di Mass Media)		5	Pengumuman Mass Media	=	1	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public		Ada/ Tidak Ada			
							Jenis Survey IKM :	=	1	Ada
						-	Survey IKM	=	1	

Berdasarkan matriks Renstra Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 hasil bimbingan teknis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP sangat baik	55%	60%	65%	70%	75%
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti	90,5%	91%	91,5%	92%	92,5%
		Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan asset yang material	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM tingkat nasional	4%	4%	9%	18%	27%
	Meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah Kab. Pacitan	Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP	Level 2 (berkembang)	Level 2 (berkembang)	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 2 (infrastruktur)	Level 2 (infrastruktur)	Level 2 (infrastruktur)	Level 2 (infrastruktur)	Menuju level 3 (Integrated)
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dibidang pengawasan	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Pacitan	>B	BB	BB	BB	BB

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN

No.	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	I K K	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Realisasi capaian sampai dengan Tribulan II Tahun 2019	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP sangat baik			55%	60%	65%	70%	75%	-	70%	75%	
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti			90,5%	91%	91,5%	92%	92,5%	92,5%	92%	92,5%	
3	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan asset yang material			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM tingkat nasional			4%	4%	9%	18%	27%				
5	Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP			Level 2 (berkembang)	Level 2 (berkembang)	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	
6	Level Kapabilitas APiP			Level 2 (infrastruktur)	Level 2 (infrastruktur)	Level 2 (infrastruktur)	Level 2 (infrastruktur)	Level 2 (infrastruktur)	Level 2 (infrastruktur)	Level 2 (infrastruktur)	Level 2 (infrastruktur)	
7	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Pacitan			Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ini selain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Inspektorat Kabupaten juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik, meminimalkan kerugian daerah, dan sebagai *quality assurance*. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif terhadap unit kerja/satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Sedangkan upaya meminimalkan kerugian daerah dilakukan melalui peningkatan pengawasan/pemeriksaan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh unit kerja/perangkat daerah, juga perlu adanya sinergi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jendral Kementerian dan BPKP.

Peran baru yang diemban oleh Inspektorat adalah sebagai *quality assurance* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, terutama dalam hal kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dinyatakan bahwa APIP melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dengan peran baru ini, Inspektorat lebih menjadi supervisor atau pendampingan bagi OPD.

Permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di Inspektorat Kabupaten Pacitan menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

a) Faktor Sumber Daya Manusia

- (1) Kurangnya pelatihan teknis fungsional untuk meningkatkan kemampuan tenaga aparatur pengawasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk mengikuti workshop/ bimtek.
- (2) Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pengawasan di bidang teknis dan regulasi.

b) Faktor Sarana dan Prasarana

- (1) Masih kurangnya sarana penunjang teknis dan operasional dalam melaksanakan pemeriksaan/pengawasan sehingga menghambat kinerja pemeriksaan.
- (2) Belum digunakannya teknologi informasi secara komprehensif untuk mendukung kualitas pemeriksaan/pengawasan.
- (3) Belum terintegrasinya arsip penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk database pengawasan yang berisi dokumen-dokumen perangkat daerah.

c) Faktor Eksternal

- (1) Adanya sikap obyek pemeriksaan (obrik) yang kurang transparan dalam memberikan informasi untuk sarana evaluasi dan perbaikan manajemen.
- (2) Lambatnya respon dari entitas/audite yang diperiksa dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Inspektorat dituntut untuk mereposisi fungsi dan perannya, sebagai tuntutan profesionalisme lembaga dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa hal yang akan menjadi tantangan bagi Inspektorat adalah :

- a) Pergeseran paradigma peran dan fungsi Inspektorat dari peran sekedar mencari-cari kesalahan (*watch dog*) menjadi penjamin mutu (*quality assurance*). Peran ini menuntut banyak hal yang “lebih” daripada masa sebelumnya. Selain peningkatan kualitas SDM, kinerja Inspektorat haruslah menunjukkan peran baru ini, bukan hanya sekedar menjadi ‘yang ditakuti’.

- b) Pengawasan akuntabilitas pelaksanaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan Daerah, yang setiap tahun diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Pada tahun 2013, 2014 2015, 2017 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini tentunya menjadi pemicu bagi Inspektorat untuk senantiasa meningkatkan kinerja agar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dapat dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang.
- c) Peningkatan kapabilitas level APIP lebih baik, bahkan lebih sempurna dibanding SDM pada OPD lain. Mengingat posisi Inspektorat sebagai institusi pengawas, sehingga stigma ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Untuk itu pengembangan diri mutlak diperlukan dan menjadi prioritas.
- d) Adanya perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan pengembangan e-government yang menuntut peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
- e) Adanya peningkatan jumlah obyek serta kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Peluang-peluang yang dimiliki Inspektorat dalam melaksanakan tugas-tugasnya :

- a) Regulasi yang selalu berubah seiring dengan tuntutan masyarakat dan kepentingan pelayanan publik.
- b) Sistem pemerintahan Otonomi Daerah yang memberikan kepada Pemerintah Daerah melalui Inspektorat untuk melakukan fungsi pengawasan secara optimal dengan keleluasaan berinovasi sesuai standar yang telah ditentukan.
- c) Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan BPKP, Inspektorat Propinsi, maupun Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga lain sehingga secara langsung dapat meningkatkan SDM Aparat Pengawasan.
- d) Adanya kenaikan prosentase penyelesaian temuan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksa, sehingga dapat menambah kepercayaan dan mengembangkan diri sebagai instansi yang dipercaya obrik dalam

mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN (*clean government and good governance*).

- e) Pembentukan pejabat fungsional, yang akan membawa nilai-nilai profesionalisme.
- f) Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dengan waktu yang efisien melalui sistem berbasis teknologi informasi.
- g) Penerapan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Pacitan yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang Inspektorat Kabupaten Pacitan menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini :

a) *Good Government and Clean Governance*

Adanya dorongan yang sangat kuat agar APIP berperan besar dalam mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme melalui pengawasan Reformasi Birokrasi.

b) Peningkatan Kapabilitas APIP

RPJMN 2016-2021 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level 3 dari skor Level 1 - 5. APIP dengan Level 3 (*integrated*) diharapkan telah menerapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit.

c) Pelayanan Publik

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah melalui peningkatan pengawasan atau pemantauan secara lebih insentif terhadap unit kerja/satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

pengelolaan pembangunan serta mendapatkan pelayanan yang optimal dari penyelenggara pemerintahan.

- d) Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah
Pada pelaksanaan TLHP diharapkan bagi Perangkat Daerah yang kurang datanya segera menyampaikan data setelah pemeriksaan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memuat prioritas dan sasaran pembangunan serta program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam setiap penyusunan Rencana Kerja, Inspektorat Kabupaten Pacitan selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilaksanakan dalam rangka :

- a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan
- e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan. Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Pacitan diharapkan mampu mendukung tercapainya Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Adapun untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal

- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan musrenbang
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan

Untuk Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pacitan Tahun 2020, khususnya Inspektorat Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan KUA PEMBAHASAN Tahun 2020.

TABEL 2.4
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
(BERDASARKAN KUA-PPAS PEMBAHASAN) INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAERAH		TARGET	JUMLAH PLAFON			
		KELUARAN	HASIL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100	718.974.500,00
4	05	01	19	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan, Jumlah aset yang dikelola, Jumlah pegawai yang dikelola, Jumlah pengadaan logistik perangkat daerah, Jumlah perjalanan dinas perangkat daerah	Nilai hasil survey IKM	48 kali, 610 unit, 42 orang, 100500 unit, 260 kali	718.974.500,00
4	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Hasil nilai evaluasi SAKIP PD	> B	27.023.190,00
4	05	06	10	Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab.Pacitan	11 Dokumen	5.899.150,00
4	05	06	14	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab.Pacitan	14 Dokumen, 6 laporan	21.124.040,00

KODE	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAERAH		TARGET	JUMLAH PLAFON			
		KELUARAN	HASIL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
4	05	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Pengawasan sebagaimana target PKPT / Non PKPT	100	1.146.307.100,00
						Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	92	
4	05	20	12	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material	1 Laporan	75.181.000,00
4	05	20	19	Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material	47 laporan	317.880.100,00
4	05	20	24	Pengawasan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan pengawasan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persentase unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM tingkat nasional	5 kali kegiatan	118.546.000,00
4	05	20	25	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Terlaksananya asistensi pendampingan SPIP ke perangkat daerah	Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP	1 Kali Kegiatan	76.628.000,00
4	05	20	26	Survei Penilaian Integritas	Jumlah dokumen hasil survei penilaian integritas	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP sangat baik	1 dokumen	86.170.000,00
4	05	20	27	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran APBD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran APBD	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti	9 Laporan	25.509.500,00

KODE	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAERAH		TARGET	JUMLAH PLAFON			
		KELUARAN	HASIL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
4	05	20	28	Reviu dan Evaluasi SAKIP – LPPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKj.IP Pemda dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, Jumlah Laporan Hasil Reviu LPPD	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP sangat baik	44 Laporan, 1 Laporan	74.318.500,00
4	05	20	29	Pemutakhiran dan Monev TLHP	Jumlah Laporan TLHP BPK dan Rakorwas, Jumlah dokumen Ikhtisar hasil pengawasan evaluasi TLHP APIP	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti	4 Laporan, 2 Dokumen	132.914.000,00
4	05	20	30	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa	Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material	96 Laporan	239.160.000,00
4	05	21		Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan		Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan	52,50	617.655.050,00
4	05	21	04	Peningkatan SDM Aparatur Bidang Pengawasan	Jumlah benchmarking yang dilaksanakan	Level Kapabilitas APIP	3 kali kegiatan	297.150.000,00
4	05	21	05	Pelatihan Pengembangan APIP	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan workshop yang dilaksanakan , Jumlah APIP yang mendapatkan bimbingan teknis	Level Kapabilitas APIP	6 kali kegiatan, 21 orang	320.505.050,00
4	05	22		Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan		Persentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun	88,8	81.640.000,00
4	05	22	02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah sistem dan prosedur yang disusun	Persentase Pedoman Sisdur pengawasan yang disusun	1 Dokumen	81.640.000,00

KODE	PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN DAERAH		TARGET	JUMLAH PLAFON			
		KELUARAN	HASIL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
4	05	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	343.454.160,00
4	05	24	04	Operasionalisasi Saber Pungli	Terselenggaranya kegiatan operasionalisasi Saber Pungli	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	12 Bulan	285.506.000,00
4	05	24	07	Koordinasi Kerjasama APIP dan APH	Jumlah Koordinasi Kerjasama APIP dan APH	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	4 kali kegiatan	42.374.260,00
4	05	24	08	Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Izin Perceraian bagi PNS	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat/kasus, Jumlah Laporan Penanganan Izin Perceraian bagi PNS	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	5 Laporan, 15 Laporan	15.573.900,00
TOTAL								2.935.054.000,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Pacitan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Pacitan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para *stakeholders*.

Berikut ini disampaikan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pacitan berdasarkan KUA-PPAS Pembahasan Tahun Anggaran 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	
1.1	Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran	Kab. Pacitan	Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan, Jumlah aset yang dikelola, Jumlah pegawai yang dikelola, Jumlah pengadaan logistik perangkat daerah, Jumlah perjalanan dinas perangkat daerah	48 kali, 610 unit, 42 orang, 100.500 unit, 260 kali	
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Hasil nilai evaluasi SAKIP PD	>B	
2.1	Pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen keuangan	11 dokumen	
2.2	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah	14 dokumen 6 laporan	
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Pengawasan sebagaimana target PKPT / Non PKPT	100%	
			Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	92%	
3.1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD	1 laporan	
3.2	Pemeriksaan reguler perangkat daerah	Kab. Pacitan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	47 laporan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.3	Pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas	Kab. Pacitan	Jumlah kegiatan pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas	5 kali kegiatan	
3.4	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Kab. Pacitan	Terlaksananya asistensi pendampingan SPIP ke perangkat daerah	1 kali kegiatan	
3.5	Survei Penilaian Integritas	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen hasil survei penilaian integritas	1 dokumen	
3.6	Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran APBD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran APBD	9 laporan	
3.7	Reviu dan evaluasi SAKIP-LPPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKJ.IP Pemda dan evaluasi SAKIP perangkat daerah Jumlah Laporan Hasil Reviu LPPD	44 laporan 1 laporan	
3.8	Pemutakhiran dan monev TLHP	Kab. Pacitan	Jumlah laporan TLHP BPK dan Rakorwas; Jumlah dokumen ikhtisar hasil pengawasan evaluasi TLHP APIP	4 laporan 2 dokumen	
3.9	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan desa	96 laporan	
4	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan		Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan	52,50%	
4.1	Peningkatan SDM aparatur bidang pengawasan	Kab. Pacitan	Jumlah benchmarking yang dilaksanakan	3 kali kegiatan	
4.2	Pelatihan pengembangan APIP	Kab. Pacitan	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan workshop yang dilaksanakan, Jumlah APIP yang mendapatkan bimbingan teknis	6 kali kegiatan 21 orang	
5	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan		Persentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun	88,8%	
5.1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Kab. Pacitan	Jumlah sistem dan prosedur yang disusun	1 dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	
6.1	Operasionalisasi saber pungli	Kab. Pacitan	Terselenggaranya kegiatan operasionalisasi saber pungli	12 bulan	
6.2	Koordinasi kerjasama APIP dan APH	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi kerjasama APIP dan APH	4 kali kegiatan	
6.3	Penanganan pengaduan masyarakat dan izin perceraian bagi PNS	Kab. Pacitan	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat/kasus Jumlah laporan penanganan izin perceraian bagi PNS	5 laporan 15 laporan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk:

1. Melaksanakan pengawasan secara intensif atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.
2. Menunjang peningkatan kinerja manajemen pemerintahan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur , Sarana dan Prasarana.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusunlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat melalui pelaksanaan kegiatan.

Tujuan Rencana Kerja Inspektorat adalah:

1. Peningkatan Kinerja Pengawasan.
2. Peningkatan Profesionalisme aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah
3. Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kinerja pengawasan
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparat Pengawasan
3. Tercapainya tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan

3.3. Program dan Kegiatan

A. Program

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
- c) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- d) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.
- e) Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan.
- f) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

B. Kegiatan

- a) Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan:

- 1) Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran.

- b) Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

Kegiatan:

- 1) Pengelolaan keuangan perangkat daerah;
- 2) Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah.

- c) Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Kegiatan:

- 1) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) Pemeriksaan reguler perangkat daerah;
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
- 4) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 5) Survei Penilaian Integritas;
- 6) Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran APBD ;
- 7) Reviu dan evaluasi SAKIP - LPPD;
- 8) Pemutakhiran dan monev TLHP;
- 9) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

- d) Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.

Kegiatan:

- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bidang Pengawasan;
- 2) Pelatihan pengembangan APIP.

- e) Program : Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan.

Kegiatan:

- 1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

- f) Program : Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Kegiatan:

- 1) Operasionalisasi saber pungli;
- 2) Koordinasi kerjasama APIP dan APH;
- 3) Penanganan pengaduan masyarakat dan izin perceraian bagi PNS .

Tabel. Bab III
RANCANGAN AKHIR

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah:INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.348.376.400,00				4.499.000.000,00
	Pemerintahan Umum				4.348.376.400,00				4.499.000.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional		100	775.190.500,00	DAU			950.000.000,00
	Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumah aktivitas/ operasional rutin yang dilaksanakan, Jumlah aset yang dikelola, Jumlah pegawai yang dikelola, Jumlah pengadaan logistik perangkat daerah, Jumlah perjalanan dinas perangkat daerah	Kab. Pacitan	48 kali 610 unit 42 orang 100500 unit 260 kali	775.190.500,00	DAU		48 kali 650 unit 42 orang 101000 unit 270 kali	950.000.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai evaluasi SAKIP PD		>B	915.949.590,00	DAU		>B	125.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen keuangan	Kab. Pacitan	11 dokumen	879.075.550,00			11 dokumen	75.000.000,00
	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Pacitan	14 dokumen 6 laporan	36.874.040,00	DAU		14 dokumen 6 laporan	50.000.000,00
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT		100	1.572.437.100,00	BHP/BPU SAT, BK PROV, BHP/BP PROV, DAU		100	2.249.000.000,00
		Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan		92				92,50	
	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD	Kab. Pacitan	1 laporan	86.231.000,00			1 laporan	60.000.000,00
	Pemeriksaan reguler perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	Kab. Pacitan	47 laporan	489.160.100,00			47 laporan	929.000.000,00
	Pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas	Jumlah kegiatan pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas	Kab. Pacitan	5 kali kegiatan	129.746.000,00			5 kali kegiatan	170.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Terlaksananya asistensi pendampingan SPIP ke perangkat daerah	Kab. Pacitan	1 kali kegiatan	81.378.000,00			1 kali kegiatan	50.000.000,00
	Survei Penilaian Integritas	Jumlah dokumen hasil survei penilaian integritas	Kab. Pacitan	1 dokumen	116.620.000,00			1 dokumen	130.000.000,00
	Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran APBD	Jumlah Laporan Hasil Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran APBD	Kab. Pacitan	9 laporan	100.359.500,00			9 laporan	120.000.000,00
	Reviu dan Evaluasi SAKIP-LPPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKj.IP Pemda dan Evaluasi SAKIP perangkat daerah, Jumlah Laporan Hasil Reviu LPPD	Kab. Pacitan	44 laporan 1 laporan	85.908.500,00			44 laporan 1 laporan	75.000.000,00
	Pemutakhiran dan Monev TLHP	Jumlah laporan TLHP BP K dan Rakorwas, Jumlah dokumen ikhtisar hasil pengawasan evaluasi TLHP APIP	Kab. Pacitan	4 laporan 2 dokumen	147.174.000,00			4 laporan 2 dokumen	215.000.000,00
	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa	Kab. Pacitan	96 laporan	335.860.000,00	BK PROV,BH P/BP PUSAT, BHP/BP PROV,DA		96 laporan	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						U			
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis		52,50	626.505.050,00	PAD		55	710.000.000,00
	Peningkatan SDM aparatur bidang pengawasan	Jumlah benchmarking yang dilaksanakan	Kab. Pacitan	3 kali kegiatan	300.000.000,00			3 kali kegiatan	300.000.000,00
	Pelatihan pengembangan APIP	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan workshop yang dilaksanakan, Jumlah APIP yang mendapatkan bimbingan teknis	Kab. Pacitan	6 kali kegiatan 21 orang	326.505.050,00	PAD		6 kali kegiatan 22 orang	410.000.000,00
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun		88,8	81.640.000,00	BHP/BP PUSAT		100	75.000.000,00
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah sistem dan prosedur yang disusun	Kab. Pacitan	1 dokumen	81.640.000,00	BHP/BP PUSAT		1 dokumen	75.000.000,00
	Program Mengintensifkan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat		100	376.654.160,00	DAU		100	390.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penanganan Pengaduan Masyarakat								
	Operasionalisasi saber pungli	Terselenggaranya kegiatan operasionalisasi saber pungli	Kab. Pacitan	12 bulan	299.306.000,00			12 bulan	300.000.000,00
	Koordinasi kerjasama APIP dan APH	Jumlah koordinasi kerjasama APIP dan APH	Kab. Pacitan	4 kali kegiatan	46.774.260,00			4 kali kegiatan	50.000.000,00
	Penanganan pengaduan masyarakat dan izin perceraian bagi PNS	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat/kasus, Jumlah laporan penanganan izin perceraian bagi PNS	Kab. Pacitan	5 laporan 15 laporan	30.573.900,00	DAU		5 laporan 20 laporan	40.000.000,00
TOTAL					4.348.376.400,00				4.499.000.000,00

BAB IV

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Tahun 2020 merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 berpedoman pada renstra Inspektorat Kabupaten Pacitan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RANKHIR RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2020 Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Tahun 2020.

Rumusan rancangan akhir rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

Tabel. 4.1.

RANCANGAN AKHIR

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah:INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.348.376.400,00				4.499.000.000,00
	Pemerintahan Umum				4.348.376.400,00				4.499.000.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional		100	775.190.500,00	DAU			950.000.000,00
	Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah aktivitas/operasional rutin yang dilaksanakan, Jumlah aset yang dikelola, Jumlah pegawai yang dikelola, Jumlah pengadaan logistik perangkat daerah, Jumlah perjalanan dinas perangkat daerah	Kab. Pacitan	48 kali 610 unit 42 orang 100500 unit 260 kali	775.190.500,00	DAU		48 kali 650 unit 42 orang 101000 unit 270 kali	950.000.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil nilai evaluasi SAKIP PD		>B	915.949.590,00	DAU		>B	125.000.000,00
	Pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen keuangan	Kab. Pacitan	11 dokumen	879.075.550,00			11 dokumen	75.000.000,00
	Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Jumlah laporan capaian kinerja perangkat daerah	Kab. Pacitan	14 dokumen 6 laporan	36.874.040,00	DAU		14 dokumen 6 laporan	50.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT		100	1.572.437.100,00	BHP/B PUSAT, BK PROV, BHP/BP PROV, DAU		100	2.249.000.000,00
		Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan		92			92,50		
	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD	Kab. Pacitan	1 laporan	86.231.000,00			1 laporan	60.000.000,00
	Pemeriksaan reguler perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan	Kab. Pacitan	47 laporan	489.160.100,00			47 laporan	929.000.000,00
	Pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas	Jumlah kegiatan pengawasan reformasi birokrasi dan penegakan integritas	Kab. Pacitan	5 kali kegiatan	129.746.000,00			5 kali kegiatan	170.000.000,00
	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Terlaksananya asistensi pendampingan SPIP ke perangkat daerah	Kab. Pacitan	1 kali kegiatan	81.378.000,00			1 kali kegiatan	50.000.000,00
	Survei Penilaian Integritas	Jumlah dokumen hasil survei penilaian integritas	Kab. Pacitan	1 dokumen	116.620.000,00			1 dokumen	130.000.000,00
	Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran APBD	Jumlah Laporan Hasil Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran APBD	Kab. Pacitan	9 laporan	100.359.500,00			9 laporan	120.000.000,00
	Reviu dan Evaluasi SAKIP-LPPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKj.IP Pemda dan Evaluasi SAKIP perangkat daerah,	Kab. Pacitan	44 laporan	85.908.500,00			44 laporan	75.000.000,00
		Jumlah Laporan Hasil Reviu LPPD		1 laporan				1 laporan	
	Pemutakhiran dan Monev TLHP	Jumlah laporan TLHP BP K dan Rakorwas,	Kab. Pacitan	4 laporan	147.174.000,00			4 laporan	215.000.000,00
		Jumlah dokumen ikhtisar hasil pengawasan evaluasi TLHP APIP		2 dokumen				2 dokumen	
	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa	Kab. Pacitan	96 laporan	335.860.000,00	BK PROV, BHP/BP PUSAT, BHP/BP PROV, DAU		96 laporan	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis		52,50	626.505.050,00	PAD		55	710.000.000,00
	Peningkatan SDM aparatur bidang pengawasan	Jumlah benchmarking yang dilaksanakan	Kab. Pacitan	3 kali kegiatan	300.000.000,00			3 kali kegiatan	300.000.000,00
	Pelatihan pengembangan APIP	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan workshop yang dilaksanakan, Jumlah APIP yang mendapatkan bimbingan teknis	Kab. Pacitan	6 kali kegiatan 21 orang	326.505.050,00	PAD		6 kali kegiatan 22 orang	410.000.000,00
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pedoman sisduw pengawasan yang disusun		88,8	81.640.000,00	BHP/BP PUSAT		100	75.000.000,00
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah sistem dan prosedur yang disusun	Kab. Pacitan	1 dokumen	81.640.000,00	BHP/BP PUSAT		1 dokumen	75.000.000,00
	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat		100	376.654.160,00	DAU		100	390.000.000,00
	Operasionalisasi saber pungli	Terselenggaranya kegiatan operasionalisasi saber pungli	Kab. Pacitan	12 bulan	299.306.000,00			12 bulan	300.000.000,00
	Koordinasi kerjasama APIP dan APH	Jumlah koordinasi kerjasama APIP dan APH	Kab. Pacitan	4 kali kegiatan	46.774.260,00			4 kali kegiatan	50.000.000,00
	Penanganan pengaduan masyarakat dan izin perceraian bagi PNS	Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat/kasus, Jumlah laporan penanganan izin perceraian bagi PNS	Kab. Pacitan	5 laporan 15 laporan	30.573.900,00	DAU		5 laporan 20 laporan	40.000.000,00
TOTAL					4.348.376.400,00				4.499.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pacitan tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak baik dari pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Kabupaten Pacitan. Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat diharapkan, sehingga terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bersih dan berwibawa akan lebih cepat tercapai.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun 2020 diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pacitan dapat terlaksana secara sinergis.